Gara-gara ini, Kepala SKPD Dilarang Cuti

Wakil Wali Kota Banjarmasin Hermansyah melarang semua kepala SKPD mengambil jatah cuti sampai akhir tahun nanti.

Larangan itu demi mempercepat serapan anggaran. Dalam rapat evaluasi di Aula Kayuh Baimbai, Balai Kota, Hermansyah geram melihat rendahnya serapan anggaran pemko. Sementara akhir tahun sudah dekat.

Keprihatinan Hermansyah kian bertambah setelah mendengar ada kepala dinas yang pergi cuti. Padahal dibandingkan yang lain, serapan dinasnya tergolong yang paling rendah.

Dia kemudian meminta Sekdako Banjarmasin Hamli Kursani untuk tak meloloskan permohonan cuti dari kepala dinas, badan, dan bagian. Larangan ini berlaku sampai kinerja SKPD membaik.

Hermansyah kian muram setelah mengetahui beberapa kadis absen dari rapat evaluasi tersebut. Antara lain Kepala Dinas Kesehatan Machli Riyadi, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Ikhsan Alhaq, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Taufik Rivani, Kepala Dinas PUPR Ariffin Noor dan Kepala Dinas Pendidikan Totok Agus Daryanto.

Melihat fakta itu, Hermansyah menuntut semua kepala SKPD untuk memprioritaskan pekerjaannya. Kalau bisa dikebut. Dikarenakan sudah mau tutup tahun, kemudian sedang

membahas rancangan APBD tahun depan di DPRD. Disebutkan Hermansyah, serapan anggaran pemko baru mencapai 50 persen.

Sumber berita:

1. **https://banjarmasinnews.com**, *Gara-gara Ini Kepala SKPD Dilarang Cuti*
2. **https://kalsel.prokal.co**, *Gara-gara Ini Kepala SKPD Dilarang Cuti*, Rabu 20 November 2019

Catatan berita:

Kinerja pemerintah baik pusat maupun daerah seringkali diukur dengan penyerapan anggarannya. Hal ini tidak salah, karena dengan anggaran yang terserap dengan baik, efektif, efien dan optimal maka masyarakat dapat merasakan manfaatnya seperti pelayanan pemerintah yang makin baik, infrastruktur yang makin banyak dan lengkap, pertumbuhan ekonomi yang makin baik dan lain sebagainya.

Dengan tidak terserapnya anggaran pemerintah secara maksimal menjadi salah satu bukti bahwa lemahnya perencanaaan anggaran mencerminkan perencanaaan program dan proyek pemerintah yang lemah dan tidak matang, yang disebabkan kurangnya Sumber Daya Manusia yang memenuhi untuk mengelola dengan baik setiap anggaran yang ada sehingga dinilai mempengaruh kinerja dari aparatur negara itu sendiri.